

## **BAB II**

### **LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai deskripsi dari lokasi yang menjadi obyek penelitian. Dalam bab ini terdapat tiga sub bab, yakni : (1) Gambaran umum Kota Surakarta, (2) Gambaran umum instansi tujuan penelitian yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta, serta (3) Gambaran umum mengenai implementasi *E budgeting* di Kota Surakarta. Bab ini bertujuan untuk mengenal lebih jauh lokasi dan kondisi dari obyek penelitian.

#### **2.1. Gambaran Umum Kota Surakarta**

Kota Surakarta yang juga dikenal sebagai Kota Solo, adalah wilayah otonom dengan status Kota dibawah Provinsi Jawa tengah. . Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Bersama dengan Yogyakarta, Surakarta merupakan pewaris Kesultanan Mataram yang dipecah melalui Perjanjian Giyanti, pada tahun 1755. Kota Surakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi sejarah, tradisi dan budaya Jawa dibanggakan masyarakatnya, karena hal ini pula Kota ini menjadi salah satu tujuan wisata yang paling menarik.

Pada tanggal 9 Desember 2015 Pemerintah Kota Surakarta telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Berdasarkan hasil Pemilukada tersebut, telah terpilih pasangan FX. HADI RUDYATMO dan Dr. H. ACHMAD PURNOMO, Apt. Sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surakarta,

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-694 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-695 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2016-2021.

Visi Misi dan Lambang Visi dan Misi Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021;

Visi Walikota, **TERWUJUDNYA SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”**

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut:

1. *Budaya*, Surakarta sebagai Kota Budaya mengandung maksud bahwa pengembangan Kota Surakarta memiliki wawasan budaya dalam arti luas, dimana seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur berkepribadian , demokratis, rasional, berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang bereke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2. *Mandiri*, mandiri dalam visi dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan dan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki serta proaktif membangun jejaring dengan semua pemangku kepentingan terkait. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi yang dimiliki dengan didukung oleh sumber

daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

3. *Maju*, maju diterjemahkan sebagai konsisi Kota Surakarta dengan masyarakatnya yang memiliki ciri-ciri keunggulan. Indikator keunggulan dapat ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kreatif.
4. *Sejahtera*, sejahtera mencakup kesejahteraan lahir dan batin. Sejahtera lahir berarti kebutuhan sandang, pangan dan papan, terpenuhinya kebutuhan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita serta kemampuan daya beli. Sejahtera batin berarti ketentraman, keamanan, kenyamanan secara spiritual, serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan.

Visi tersebut bermakna bahwa pembangunan Kota Surakarta akan mewujudkan tatanan kota dan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kepribadian bangsa, mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki dan proaktif membangun jejaring, memiliki ciri-ciri keunggulan kompetitif dan terpenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani dalam kondisi kota yang kondusif untuk tempat tinggal maupun bekerja.

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga oleh segenap *stakeholders* selaku pemangku kepentingan dalam pembangunan. Misi Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2021 adalah :

## **“Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan”**

Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021. Dan setiap misi memiliki sasaran dan strateginya masing-masing.

*Misi Waras mendukung*; Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, dan rohani, dan sosial dalam lingkungan hidup yang sehat menuju masyarakat produktif, kreatif dan sejahtera serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. *Misi Wasis mendukung*; Mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampi, berbudi pekerti luhur, berkarakter dan berkontribusi kemajuan daya saing kota. *Misi Wareg mendukung*; Mewujudkan masyarakat kota yang produktif mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani menuju masyarakat mandiri dan partisipatif membangun kesejahteraan kota. *Misi Mapan mendukung*; Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani. *Misi Papan mendukung*; Mewujudkan keseimbangan kebutuhan papan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan dinamika kebutuhan pertumbuhan penduduk menuju kota berwawasan pembangunan berkelanjutan.

### 2.1.1 Aspek Geografis

Kota Surakarta merupakan dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m diatas permukaan air laut. Dengan luas sekitas 44 km<sup>2</sup> , Kota Surakarta terletak diantara 110 45` 15" - 110 45` 35" Bujur Timur dan 70` 36" – 70` 56" Lintang Selatan. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh tiga sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Secara geografis, Kota Surakarta memiliki batas-batas wilayah yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali.

Kota Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat dan 51 kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang lurah. Kelima kecamatan di Surakarta yaitu;

**Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan Kota Surakarta**

No	Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1.	33.72.05	Banjarsari	15	Banyuanyar, Banjarsari, Gilingan, Joglo, Kadipiro, Keprabon, Kestalan, Ketelan, Manahan, Mangkubumen, Nusukan, Punggawan, Setabelan, Sumber, Timuran

2.	33.72.04	Jebres	11	Gandekan, Jagalan, Jebres, Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan, Mojosongo, Pucang Sawit, Purwodiningratan, Sewu, Sudiprajan, Tegalharjo
3	33.72.01	Laweyan	11	Bumi, Jajar, Karangasem, Kerten, Laweyan, Pajang, Panularan, Penumping, Purwosari, Sondakan, Sriwedari
4.	33.72.03	Pasar Kliwon	10	Buluwarti, Gajahan, Joyosuran, Kampung Baru, Kauman, Kedung Lumbu, Mojo, Pasar Kliwon, Sangkrah, Semanggi
5.	33.72.02	Serengan	7	Danukusuman, Jayengan, Joyotakan, Kemlayan, Klatonan, Serengan, Tipes

**Tabel 2. 2 Luas Perkecamatan dan Jarak Kantor Kecamatan ke Kantor Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Presentase	Jarak Ibukota Surakarta (Km)
1	Laweyan	Penumping	8,64	19,62	3,2
2	Serengan	Serengan	3,19	7,24	2,8
3	Pasar Kliwon	Joyosuran	4,82	10,95	2,2
4	Jebres	Jebres	12,58	28,56	3,5
5	Banjarsari	Banyuanyar	14,81	33,63	7,5
	Kota Surakarta		44,06	100	

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta (Diolah)

Dari tabel luas wilayah perkecamatan dan jarak kantor kecamatan ke kantor pemerintah Kota Surakarta tahun 2019 dapat diketahui bahwa setiap kecamatan di

Kota Surakarta memiliki ibukota kecamatan masing-masing, karena luas wilayah Kota Surakarta hanya 44,06km<sup>2</sup> yang membuat setiap wilayah administratif kecamatan memiliki jarak yang berdekatan dengan kantor pemerintahan. Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terbesar dengan luas 14,81 km<sup>2</sup> atau sebesar 33,63% dari luas Kota Surakarta dengan ibukota kecamatan berada di Banyuanyar yang merupakan kecamatan yang berada paling jauh dari kantor pemerintahan Kota Surakarta dengan jarak 7,5 km. Sedangkan Kecamatan Serengan merupakan Kecamatan terkecil dengan luas sebesar 3,19km<sup>2</sup> atau sebesar 7,24% dari luas Kota Surakarta. Dan Kecamatan yang memiliki jarak paling dekat dengan kantor pemerintah Kota Surakarta. Jarak paling dekat dengan kantor pemerintahan Kota Surakarta adalah Kecamatan Pasar Kliwon dengan jarak 2,2 km dan ibukota kecamatan berada di Joyosuran. Kantor Pemerintah Kota Surakarta sendiri berada di Kecamatan Pasar Kliwon. Dibawah ini dapat dilihat dengan jelas Peta Kota Surakarta secara keseluruhan:

**Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kota Surakarta**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

### 2.1.2 Aspek Demografis

Kondisi kependudukan pada suatu wilayah perlu dibahas dalam kegiatan pengkajian suatu wilayah. Substansi kependudukan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan meliputi jumlah penduduk dan Kepala Keluarga (KK), jumlah penduduk miskin dan persebarannya, proyeksi pertumbuhan penduduk, serta jumlah penduduk perkotaan dan proyeksi urbanisasi

Salah satu sensus paling awal yang dilakukan di wilayah Karesidenan Surakarta (*Residentie Soerakarta*) pada tahun 1885 mencatat terdapat 1.053.985 penduduk, termasuk 2.694 orang Eropa dan 7.543 orang Tionghoa. Wilayah seluas 5.677km<sup>2</sup> tersebut memiliki kepadatan 186 penduduk/km<sup>2</sup>. Ibukota Karesidenan tersebut sendiri pada tahun 1880 memiliki 124.041 penduduk.

Penduduk Kota Surakarta hasil registrasi penduduk tahun 2017 sebanyak 562.801 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 276.981 jiwa dan perempuan sebanyak 285.820 jiwa. Dengan luas wilayah 44,04 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk tercatat 12.779 per km<sup>2</sup>.

**Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Kota Surakarta**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)		Laju Pertumbuhan Tahun 2018-2019	Rasio Jenis Kelamin		Tingkat kepadatan Per km <sup>2</sup>	
	2018	2019		2018	2019	2018	2019
Laweyan	89.254	89.547	0,328	0,94	0,94	10.332	10.364
Serengan	45.275	45.424	0,329	0,93	0,93	14.175	14.240
Pasar Kliwon	77.027	77.280	0,328	0,97	0,97	15.997	16.033
Jebres	143.180	143.650	0,328	0,93	0,93	11.380	11.419
Banjarsari	163.151	163.686	0,328	0,95	0,95	11.016	11.052
Kota Surakarta	517.887	519.587	0,3282	0,944	0,944	11.759	11.789

Sumber : Statistik Kota Surakarta (*Data Diolah*)

Dari tabel diatas, jumlah penduduk, laju pertumbuhan, rasio jenis kelamin, dan tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta dapat diketahui bahwa pada 2018 jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 517.887 jiwa dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah penduduk mencapai 519.587 jiwa. Sehingga laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta sebesar 0,328%.

**Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	
01. Laweyan	49.379	51.482	100.861	95,92
02. Serengan	26.410	27.586	53.996	95,74
03. Pasar Kliwon	41.947	42.782	84.729	98,05
	71.352	72.889	144.241	97,89

04. Jebres	87.893	91.081	178.974	96,50
05. Banjarsari				
Jumlah	276.981	285.820	562.801	96,91

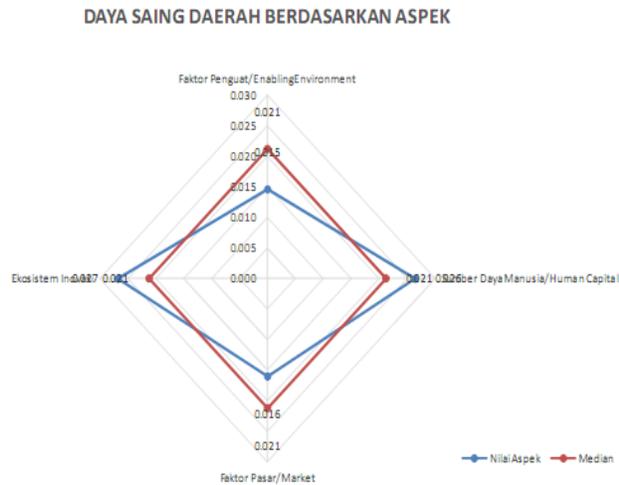
*Sumber: Dispendukcapil Kota Surakarta, Registrasi Penduduk (Data Diolah)*

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 285.820 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 276.981 jiwa sehingga perbandingan sex rasionya sebesar 96,91 persen. Artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Sedangkan penduduk menurut kecamatan, maka kecamatan Pasar Kliwon memiliki sex ratio paling tinggi.

### **2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta**

Peningkatan daya saing dan sektor-sektor unggulan Kota Surakarta dapat terlihat melalui pengukuran indeks daya saing daerah yang telah ditetaokan oleh Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam aspek penilaian yaitu lingkungan penguat/enabling environmental, aspek SDM, aspek pasar, dan aspek ekosistem inovasi, 12 pilar, 23 dimensi, dan 78 indikator yang wajib dipenuhi oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Salah satu upaya dalam meningkatkan daya saing daerah Kota Surakarta yaitu melalui fokus program, hilirisasi iptek, dan perumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah.

**Gambar 2. 2 Daya Saing Daerah Berdasarkan Aspek**



Sumber; *Surakarta.go.id*

Keunggulan daya saing Kota Surakarta dari aspek sumber daya manusia dan ekosistem inovasi berimplikasi pada beberapa agenda kebijakan dan pengembangan terkait penguatan daya saing kota. agenda kebijakan dan pengembangan tersebut juga diarahkan untuk memperbaiki kelemahan daya saing dari aspek keuangan daerah, stabilitas ekonomi dan keterampilan tenaga kerja.

Dalam perkembangan Surakarta telah memenuhi standar kriteria sebagai Daerah Otonom berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebut dengan Daerah Kota Madya Surakarta. Kemudian berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kota Madya Surakarta disebut Daerah Tingkat II dan UU

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai Kota Surakarta.<sup>1</sup>

Kota Surakarta memiliki potensi budaya dan ekonomi yang telah dikenal, khususnya dibidang perdagangan dan pariwisata. Potensi wisata di Surakarta sangat melimpah meliputi wisata sejarah seperti Kraton Surakarta, Pura Mangkunegaran dan Museum Radyapustaka, wisata belanja pun tersedia seperti batik di Pasar Klewer, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman dan Pusat Grosir Solo. Tidak hanya itu, di Kota Surakarta juga terdapat event-event wisata yang telah menjadi acara tahunan di Surakarta, seperti Solo Batik Carnival, Sekatenan, Karnaval Wayang dan lain-lain. Industri batik menjadi salah satu industri khas Kota Surakarta. Sentra kerajinan batik dan perdagangan batik berpusat di Laweyan dan Kauman, Pasar Klewer serta beberapa pasar batik tradisional lain menjadi salah satu pusat perdagangan batik di Indonesia. perdagangan di Surakarta berada di bawah naungan dinas industri dan perdagangan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi reformasi dalam tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi cikal bakal lahirnya otonomi daerah di Indonesia termasuk adanya desentralisasi fiskal. Dengan adanya otonomi daerah maka mampu mendorong kegairahan daerah untuk lebih mengembangkan perekonomiannya. Jika merujuk pada Undang-Undang

---

<sup>1</sup>*Analisis Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2015*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta

Nomor 32 Tahun 2004, maka tentunya pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini ada karena setiap daerah memiliki karakter baik sosial, budaya, dan geografis yang berbeda-beda sehingga kebijakan tidak bisa disama ratakan, artinya setiap daerah memerlukan kebijakan yang tentunya relevan dan cocok untuk diimplementasikan di daerahnya.

Dalam hal kebijakan pembangunan ekonomi pun setiap daerah diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya sehingga mampu mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di era otonomi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara otomatis menuntut pemerintah daerah untuk berorientasi secara global. Hal ini karena tingkat persaingan antar negara yang semakin tinggi dan sangat berdampak untuk perekonomian Indonesia khususnya di Daerah

Pusat bisnis Kota Surakarta terletak disepanjang jalan Slamet Riyadi. Beberapa bank, hotel, pusat perbelanjaan, restoran internasional, hingga tujuan wisata dan hiburan terletak di sepanjang jalan protokol ini, termasuk Graha Soloraya, Loji Gandrung (rumah dinas Walikota). Kota Surakarta memiliki beberapa pabrik yang memperkerjakan karyawan dalam jumlah yang besar antara lain Sritex, Konimex, dan Jamu Air Mancur. Surakarta merupakan salah satu sentra pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) mebel dan kerajinan. Terdapat lebih dari 150 pelaku IKM mebel dan kerajinan di Surakarta yang produknya mampu berdaya saing di pasar

dalam negeri, bahkan telah menembus pasar ekspor seperti Amerika Serikat, Eropa dan Timur Tengah.

Pertumbuhan nilai ekspor terus ditingkatkan seiring dengan menguatnya kondisi ekonomi dalam negeri. Di tahun 2019 Dinas Perdagangan Kota Surakarta menargetkan kenaikan nilai ekspor sebesar 10%. Seiring dengan produktivitas yang semakin meningkat pada industri di Kota Solo.

Dikutip dari salah satu berita online, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surakarta mengatakan, pada 2018 realisasi nilai ekspor mencapai 44 juta Dolar AS. Sedangkan dari sisi volume sebesar 9 juta kilogram secara keseluruhan.

“Dari sisi nilai, yang memberikan kontribusi paling besar yaitu komoditas tekstil dan produk tekstil sebesar 20,9 juta Dolar AS. Dengan kontribusi volume ekspor sekitar 1,8 juta kilogram”.<sup>2</sup>

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1956 alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Artinya bahwa pembangunan merupakan implementasi dari tugas pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pertimbangan atas upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat luas harus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, salah satu indikator utama untuk melihat/mengukur

---

<sup>2</sup> Radar Solo, Target Ekspor Surakarta Naik 10 persen, diakses melalui laman [radarsolo.jawapos.com](http://radarsolo.jawapos.com), pada 12 Desember 2019

berhasil tidaknya suatu proses pembangunan adalah sampai sejauh mana atau seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya agar mampu mencapai hasil yang optimal. Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhan ekonominya, dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah satunya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah, pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah. Jika dilihat dari kemakmuran suatu daerah, maka daerah satu tidak akan sama dengan daerah yang lainnya walaupun dalam satu provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah dalam satu periode tertentu.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu darha. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan

berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama tahun 2013 samapi dengan 2017 struktur perekonomian Kota Surakarta disominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, industri pengolahan, dan penyediaan akomodasi makan dan minum. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel dibawah ;

**Tabel 2. 5 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Kota  
Surakarta atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (persen), 2013-  
2017**

Kategori Category	Lapangan Usaha/Industry	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry&Fishing	0.54	0.52	0.52	0.52	0.50
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting, and Agriculture Services	0.54	0.52	0.52	0.51	0.50
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Perikanan/Fishery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining&Quarrying	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri pengolahan/Manufacturing	8.39	8.70	8.59	8.58	8.47
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity&Gas	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management&Remediation Activities	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15
F	Konstruksi/Construction	26.50	26.80	26.91	26.97	26.71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale&retail Trade; Repair of Motor Vehicles&Motorcycles	23.52	22.79	22.56	22.46	22.43
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	2.45	2.59	2.68	2.61	2.72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation &Food Service Activities	5.55	5.70	5.76	5.93	5.85
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	11.01	10.77	10.63	10.44	11.09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial&Insurance	3.67	3.66	3.75	3.88	3.89

	Activities					
L	Real Estat/Real Estate Activities	3.95	4.04	4.11	4.11	4.07
M,N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	0.72	0.73	0.78	0.81	0.80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration&defence; Compulsary Social Security	6.10	5.89	5.97	5.95	5.72
P	Jasa Pendidikan/Education	5.28	5.41	5.37	5.34	5.34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1.02	1.08	1.10	1.10	1.11
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Service Activites	0.94	0.95	0.93	0.95	0.94
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	100	100	100	100	100

Sumber; *Gross Regional Domestic Product of Surakarta Municipalty by Industry 2013-2017*

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, kelompok kategori informasi dan komunikasi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi dan makanan minuman peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5%.

## **2.2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Badan Pendaatan Pengealolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta merupakan salah satu instansi pemerintah daerah Kota Surakarta yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah Kota Surakarta berdasarkan asas otonomi dan pembantuan, BPPKAD Kota Surakarta bertanggungjawab sepenuhnya

terhadap pengelolaan seluruh keuangan dan aset daerah Kota Surakarta yang nantinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

### **2.2.1. Visi Misi BPPKAD Kota Surakarta**

#### **VISI**

Terwujudnya Pengelolaan, Penetapan, Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan.

#### **MISI**

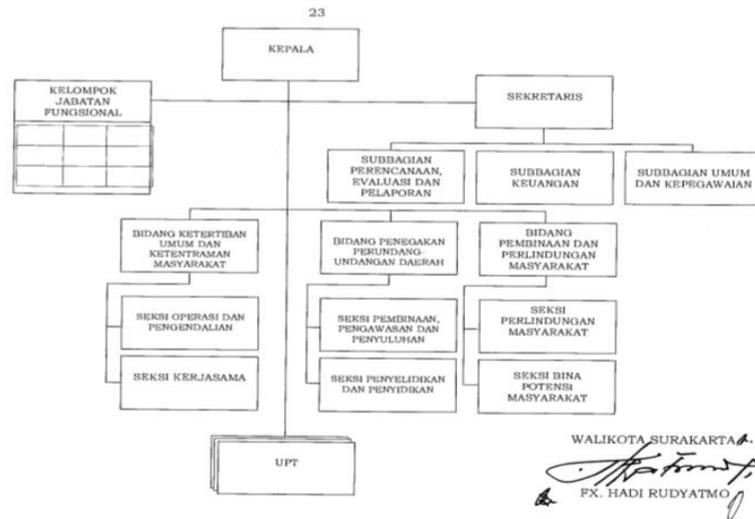
1. Meningkatkan dan mengintensifkan pendapatan daerah secara optimal
2. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien serta akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan dan keadilan
4. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah secara efektif dan efisien.<sup>3</sup>

### **2.2.2. Struktur Organisasi BPPKAD Kota Surakarta**

---

<sup>3</sup> VisiMisi Kota Surakarta, diakses melalui laman resmi BPPKAD <https://bppkad.surakarta.go.id> pada 13 Agustus 2020

**Gambar 2. 3 Struktur Organisasi BPPKA Kota Surakarta**



Sumber : Perwali Surakarta Nomor 27-c Tahun 2016

Sesuai dengan Perwali Surakarta Nomor 27-c Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kepala BPPKAD membawahi langsung Kelompok Jabatan Fungsional dan Sekretariat. Sekretariat membawahi subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian,. Lalu bidang-bidang dalam BPPKAD bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan BPPKAD. Berikut meruakan bidang-bidang yang ada dalam BPPKAD :

- A. Bidang Pendaftaran, Pendapatan dan Penetapan membawahi subbidang Pendaftaran dan Pendataan, subbidang Perhitungan dan Penetapan dan subbidang Dokumentasi dan Pelaporan.
- B. Bidang Penagihan dan Keberatan membawahi subbidang Penagihan, subbidang Keberatan, dan subbidang Kepatuhan.
- C. Bidang Anggaran membawahi subbidang Perencanaan Anggaran, subbidang Pelaksanaan Anggaran, dan subbidang Pengendalian Anggaran.
- D. Bidang Perbendaharaan membawahi subbidang Pengelolaan Kas Daerah, subbidang Belanja Langsung, subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
- E. Bidang Akuntansi membawahi subbidang Pencatatan dan Pelaporan, subbidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, subbidang Pembinaan dan Evaluasi.
- F. Bidang Aset membawahi subbidang Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan, subbidang Pengelolaan Aset Selain Tanah dan Bangunan dan subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- G. Dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertanggungjawab langsung kepada bidang-bidang di BPPKAD.

### **2.2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

#### **A. Tujuan**

1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Menyelamatkan dan memberdayakan aset pemerintah kota secara optimal.
4. Meningkatkan profesionalisme dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### **B. Sasaran Jangka Menengah**

1. Terwujudnya pencapaian pendapatan daerah sesuai target yang ditetapkan.
2. Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah.
3. Terwujudnya manajemen keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Terwujudnya pembakuan status hukum/persertifikatan dan perlindungan aset daerah.
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

#### **2.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi BPPKAD Kota Surakarta**

##### **A. Tugas Pokok**

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pennjang bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### B. Fungsi BPPKAD Kota Surakarta

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki fungsi :

1. Penyelenggaraan kesekretariatan badan;
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, meliputi pendaftaran dan pendataan wajib pajak, perhitungan, penetapan dan angsuran pajak, pembukuan penerimaan pajak serta pendapatan lain, penagihan atas keterlambatan pajak, pendapatan lain dan restitusi;
4. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
6. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah;
8. Penyelenggaraan sosialisai;
9. Pembinaan jabatan fungsional; dan
10. Pengelolaan UPT

### 2.3. Gambaran Umum E budgeting

Secara umum, *Business Budget* atau *Budget* (Anggaran) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan (yang menimbulkan penerimaan/hak dan juga pengeluaran/kewajiban), yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu/periode tertentu yang akan datang.<sup>4</sup>

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan merupakan artikulasi dari permusan strategi dan perencanaan strategis telah dibuat. Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut.<sup>5</sup> Penganggaran terbagi kedalam empat tahapan yaitu *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*.

Berdasarkan pada lampiran II Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dinyatakan bahwa meningkatnya kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan *E budgeting*; dan ditegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kualitas belanja

---

<sup>4</sup> Dominic Salvator dan Haris Munandar, 1997, *Ekonomi Internasional Jilid I*, Jakarta: Erlangga

<sup>5</sup> Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan arah kebijakannya adalah tersedianya dokumen panduan penerapan *E budgeting*, tersedianya sistem aplikasi *E budgeting* bagi pemerintah daerah dan meningkatkan presentase jumlah daerah yang menerapkan *E budgeting*. *E budgeting* merupakan sistem yang dapat saling mengawasi anggaran agar terciptanya transparansi dalam penyusunan anggaran pada suatu pemerintah daerah.

*E budgeting* memiliki keunggulan-keunggulan yang tertera dalam Paparan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Pada Rapat Koordinasi Data Sidang Keuangan Daerah Secara Nasional Tentang Persiapan Infrastruktur & SDM Dalam Implementasi *E budgeting*, sebagaimana berikut;<sup>6</sup>

1. Dapat diintegrasikan dengan sistem yang ada di daerah lain
2. Menyimpan catatan proses yang dilakukan oleh *user* (Log File/History)
3. Terdapat menu pembahasan rancangan KUA-PPAS antara OPD dengan TAPD dan TAPD dengan DPRD serta pembahasan rancangan APBD antara OPD dengan TAPD dan TAPD dengan DPRD secara elektronik sebagai upaya pencegahan korupsi
4. Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dengan tersedianya preview sandingan data RKPD vs KUA-PPAS vs Ranperda

---

<sup>6</sup> Kementerian Dalam Negeri, *Paparan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Pada Rapat Koordinasi Data Sidang Keuangan Daerah Secara Nasional Tentang Persiapan Infrastruktur & SDM Dalam Implementasi E budgeting*, diakses melalui lama [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id), pada 13 Desember 2019

5. Dapat dioperasikan dengan berbagai browser (multi browser) dan menggunakan metode cloud;
6. Menggunakan basis open source/gratis, sehingga pemda tidak memerlukan aplikasi yang memiliki lisensi khusus dan dapat melakukan modifikasi sistem secara mandiri
7. Mewujudkan konsolidasi data nasional (data APBD Prov/Kab/Kota) secara *realtime*
8. Mewujudkan transparansi dan partisipatif masyarakat.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu sistem yang mampu mengelola data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunkn oleh manajemen dalam pengambilan keputusan.

*E budgeting* saat ini sedang dikembangkan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, untuk memudahkan pengelolaan keuangan daerah secara nasional. Ada beberapa sistem yang bisa dikategorikan dalam *E budgeting* yang diterapkan oleh daerah-daerah di Indonesia seperti sistem informasi terkait pengelolaan keuangan daerah; SIMDA, SIMAKDA, SIKPD, dan lain-lain.

Pada Pemerintah Kota Surakarta, *E budgeting* diterapkan sejak tahun 2017. Yang pengelolaannya dilakukan oleh tiga dinas yang saling bekerja sama untuk menerapkan *E budgeting*, dimana perencanaan pembangunan dibawah oleh Bappeda,

kemudian pengelolaan anggaran dilakukan oleh BPPKAD sedangkan untuk pengelolaan website dilakukan oleh Diskominfo SP Kota Surakarta. Di lingkup Pemerintah Kota Surakarta sendiri, *E budgeting* diterapkan melalui SIMDA Integrated sebagai website yang mengelola anggaran APBD dari mulai perencanaan hingga evaluasi.

**Gambar 2. 4 Tampilan SIMDA Integrated Pemerintah Kota Surakarta**



Sumber : ScreenShoots (2020)

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih pada masa sekarang mengharuskan pemerintah untuk mengikuti perkembangan arus globalisasi. Dalam organisasi sektor publik juga menciptakan strategi dan inovasi untuk tercapainya tujuan pemerintah. Salah satu teknologi yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta adalah program aplikasi komputer Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Menurut Djaja (2009) dalam Budiman dan Arza (2013) aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database pengelola keuangan pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang keunggulannya adalah pekerjaan dapat terintegrasi, efisien, cepat dan akurat.

Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong efisiensi anggaran pemerintah daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mewujudkan anggaran berbasis kinerja secara elektronik (*e-performance base budgeting*). Permasalahannya masih banyak pemda yang baru menerapkan *E budgeting*, sehingga masih banyak bolong-bolong yang berpotensi menimbulkan in efisiensi. Untuk aplikasi SIMDA, hanya dapat diakses oleh admin-admin dari masing masing SKPD dan tidak bisa diakses oleh masyarakat luas. Sistem *E budgeting* melalui penerapan SIMDA Integrated pada Pemerintah Kota Surakarta ini tentunya memiliki keunggulan dalam efektivitas pekerjaan dan efisiensi biaya karena pekerjaan banyak dapat terselesaikan oleh lebih sedikit orang dan dalam waktu yang cepat. Serta budaya *paperless* dalam *E budgeting* membuat pemerintah tidak perlu menyediakan banyak kertas bagi seluruh SKPD sehingga lebih efisien dalam pelaksanaannya.

Seperti yang telah dijabarkan diatas, SIMDA Integrated hanya dapat digunakan oleh pemerintah dan bukan menjadi website transparansi kepada Pemerintah, Oleh karena itu, untuk mewujudkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kota Surakarta kemudian menghadirkan website khusus *E budgeting* yaitu [e-budgeting.surakarta.go.id](http://e-budgeting.surakarta.go.id).